

Implementasi Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan Di Kabupaten Kolaka

Fitrah Abdillah¹, Arafat², Yudi Agusman³

^{1,2,3}Prodi Administrasi Publik, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

e-mail: fitrakolaka887@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program beasiswa dan bantuan pendidikan di Kabupaten Kolaka, dengan fokus pada bagaimana standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antar organisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial politik ekonomi, serta disposisi implementator memengaruhi pelaksanaan program tersebut. Program beasiswa ini merupakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kolaka yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 sebagai upaya meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi mahasiswa berprestasi dan kurang mampu. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, informan penelitian ini yaitu mahasiswa penerima beasiswa, masyarakat dan aparatur bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA). Hasil Penelitian tahap implementasi Pemerintah Kabupaten Kolaka menyalurkan dana beasiswa khusus jenjang S1 sebesar Rp1,180.000.000 pada tahun 2023 dan Rp1,294.400.000 pada tahun 2024 yang mencakup penerima dari jenjang S1 hingga S3. Data lapangan menunjukkan bahwa jumlah penerima beasiswa tahun 2024 sebanyak 178 mahasiswa dan jumlah pengusul atau pendaftar sebanyak 253 mahasiswa., yang tersebar di berbagai perguruan tinggi negeri maupun swasta. Fakta ini memperlihatkan bahwa kebijakan beasiswa telah memberikan dampak langsung terhadap peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Kolaka. Meskipun demikian, pelaksanaan program ini belum sepenuhnya optimal, permasalahan utama dalam pelaksanaan program beasiswa di Kabupaten Kolaka terletak pada kurangnya transparansi informasi publik, khususnya terkait syarat, prosedur, dan tahapan seleksi. Banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas mekanisme seleksi beasiswa, sehingga memunculkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan terhadap proses distribusi bantuan tersebut. Ketidakjelasan informasi ini berdampak pada ketidaktepatan sasaran penerima beasiswa, sehingga perlu adanya peningkatan transparansi informasi terkait mekanisme, kriteria, dan tahapan seleksi yang dapat dipublikasikan melalui berbagai saluran resmi, baik media sosial maupun situs web pemerintah, agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi secara jelas.

Kata kunci: *Beasiswa, Implementasi kebijakan, kesejahteraan masyarakat, Pendidikan.*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pendidikan, individu mampu mengembangkan potensi spiritual, intelektual, dan keterampilan sosial yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara (Rahayu et al., 2021).

Pendidikan yang berkualitas juga berperan penting dalam menekan tingkat kemiskinan dan memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat (Irianto et al., 2024). Namun, pemerataan akses pendidikan masih menjadi tantangan serius, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Keterbatasan ekonomi menyebabkan banyak pelajar berpotensi tinggi tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengatasi kesenjangan tersebut melalui kebijakan afirmatif seperti program beasiswa dan bantuan pendidikan (Firdaus & Widiyarta, 2024).

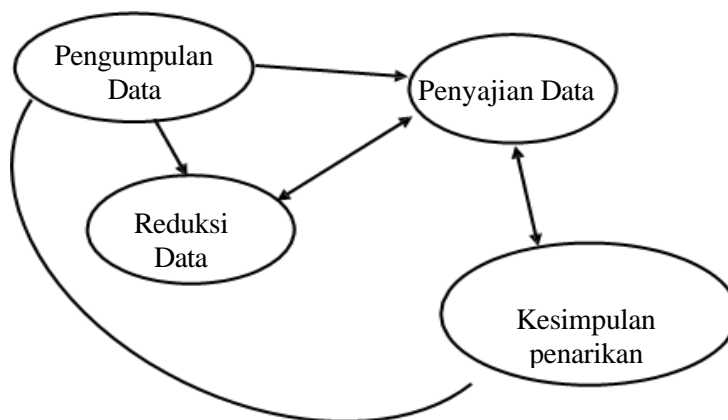
Di Kabupaten Kolaka, program beasiswa dan bantuan pendidikan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2024 yang bertujuan untuk memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat berprestasi dan kurang mampu. Program ini dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA), yaitu salah satu bagian dalam struktur Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Kolaka yang berada di bawah koordinasi langsung Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. KESRA bukan merupakan lembaga sosial independen maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersendiri, melainkan unit kerja yang memiliki fungsi koordinatif dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan masyarakat. Salah satu tugas pokoknya adalah mengelola dan menyalurkan bantuan sosial serta beasiswa pendidikan kepada masyarakat melalui mekanisme verifikasi, seleksi, dan penyaluran dana sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Melalui kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Kolaka berupaya mengatasi ketimpangan sosial-ekonomi dan membuka kesempatan bagi generasi muda untuk menempuh pendidikan tinggi, baik di dalam maupun di luar daerah. Meskipun demikian, pelaksanaan program ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya transparansi informasi publik, serta lemahnya koordinasi antarorganisasi pelaksana. Kondisi ini mengakibatkan munculnya persepsi ketidakadilan di masyarakat dan berpotensi menghambat efektivitas program (Widiyaningrum & Salsabila, 2024). Dalam konteks inilah penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis sejauh mana implementasi Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan Kabupaten Kolaka telah berjalan efektif sesuai tujuan kebijakan, serta mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya deviasi antara regulasi dan praktik pelaksanaan.

Penelitian sebelumnya menggunakan model implementasi dengan teori Edward III sedangkan Penelitian ini dengan menekankan analisis faktual terhadap model implementasi kebijakan daerah berbasis indikator Van Meter dan Van Horn (Marwiyah et al., 2022) dengan 6 (enam) variabel yaitu standar dan sasaran, ketersediaan sumber daya, hubungan antarorganisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial-politik-ekonomi, serta disposisi implementator. sekaligus mengevaluasi inovasi pelayanan publik melalui integrasi sistem informasi digital beasiswa yang mulai dirancang oleh pemerintah daerah. Berdasarkan hasil observasi awal, permasalahan utama dalam pelaksanaan program beasiswa di Kabupaten Kolaka terletak pada kurangnya transparansi informasi publik, khususnya terkait syarat, prosedur, dan tahapan seleksi. Banyak masyarakat yang belum mengetahui secara jelas mekanisme seleksi beasiswa, sehingga memunculkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan terhadap proses distribusi bantuan tersebut. Ketidakjelasan informasi ini berdampak pada ketidaktepatan sasaran penerima beasiswa, di mana bantuan berpotensi diberikan kepada mahasiswa yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah (PERDA). Meskipun kebijakan ini telah diimplementasikan oleh pemerintah daerah melalui dinas terkait, pelaksanaannya masih belum didukung oleh sistem informasi yang transparan serta mekanisme pengawasan yang ketat. Hal ini menunjukkan lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan beasiswa, karena tidak adanya jaminan bahwa proses seleksi berjalan secara objektif, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ke depan, perlu adanya pembenahan sistem seleksi, mulai dari tahap pendaftaran hingga verifikasi data dan berkas, agar penyaluran beasiswa benar-benar tepat sasaran dan bebas dari praktik yang merugikan keadilan sosial.

Berdasarkan uraian dan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul "Implementasi Program Beasiswa Dan Bantuan Pendidikan Di Kabupaten Kolaka" Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan pendidikan, tetapi juga masukan praktis bagi Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk memperbaiki tata kelola program beasiswa agar lebih transparan, efisien, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan peneliti menggambarkan fenomena sosial secara alami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang bertujuan untuk memahami secara mendalam proses implementasi program beasiswa dan bantuan pendidikan di Kabupaten Kolaka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena sosial secara alami dan kontekstual melalui interaksi langsung dengan pelaksana kebijakan dan penerima manfaat. Metode ini menekankan pada makna, nilai, serta dinamika yang terjadi selama proses implementasi kebijakan berlangsung (Sugiyono, 2021). Lokasi penelitian ditetapkan di Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka sebagai pelaksana utama program. Informan terdiri dari Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat, pegawai pelaksana program dan mahasiswa (Rogahang et al., 2023). Sumber data yang digunakan mencakup data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta dokumentasi langsung terhadap aktivitas pelaksanaan program (Syachbrani & Baharuddin, 2019). Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles et al., 1992). Pengumpulan data, dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pelaksana program (pegawai KESRA), mahasiswa penerima beasiswa, serta masyarakat penerima manfaat; observasi langsung terhadap proses administrasi dan penyaluran beasiswa; serta dokumentasi terhadap laporan kegiatan dan regulasi terkait. Reduksi data yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan antarorganisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial-politik-ekonomi, dan disposisi implementator. Penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi kesesuaian antara pelaksanaan kebijakan di lapangan dengan ketentuan regulasi yang berlaku.



Gambar 1.1 Analisis Data Kualitatif Menurut Milles dan Huberman
(sumber: Artikel Milles dan Huberman)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program beasiswa dan bantuan pendidikan di Kabupaten Kolaka telah berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Program Beasiswa dan Bantuan Pendidikan. Program ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung peningkatan akses pendidikan bagi mahasiswa berprestasi dan masyarakat kurang mampu. Penyaluran beasiswa dilakukan melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Kabupaten Kolaka dengan dua kategori utama, yaitu beasiswa prestasi dan beasiswa kurang mampu. Pada tahun 2023, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp1.180.000.000, dan meningkat pada tahun 2024 menjadi Rp1.294.400.000. Peningkatan alokasi anggaran ini menunjukkan adanya dukungan kebijakan yang kuat terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah. Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi sejumlah kendala administratif dan teknis yang perlu mendapatkan

perhatian.

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Peneliti akan menelaah Standar kebijakan program beasiswa di Kabupaten Kolaka secara formal telah dirumuskan dalam berbagai dokumen resmi pemerintah daerah seperti Peraturan Daerah (Perda) tentang kesejahteraan rakyat. Dokumen tersebut menetapkan bahwa penerima beasiswa ditujukan bagi mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang mampu dan memiliki prestasi akademik yang baik, dengan batasan pada mahasiswa semester 3 hingga semester 8. Dalam praktiknya, ditemukan bahwa proses finalisasi Peraturan Daerah belum selesai ketika program beasiswa sudah mulai dijalankan. Kondisi ini menimbulkan celah dalam pelaksanaan dan mengindikasikan lemahnya kepatuhan terhadap prosedur hukum. Selain itu, terdapat kasus penerima beasiswa yang berasal dari keluarga mampu serta mahasiswa yang berada di luar ketentuan semester yang masih mendapatkan bantuan. Fenomena ini menunjukkan adanya penyimpangan antara aturan formal dan pelaksanaan di lapangan.

Temuan lapangan diperkuat dengan hasil wawancara dengan pejabat pelaksana dan mahasiswa penerima beasiswa. Menurut Kabag Kesra dan stafnya, pelaksanaan beasiswa telah mengacu pada regulasi yang ada dan difokuskan bagi mahasiswa tidak mampu dan berprestasi, meskipun Peraturan Bupati masih dalam tahap harmonisasi di tingkat provinsi. Namun, dari sisi mahasiswa, muncul kritik terkait ketidaktepatan sasaran dan transparansi pelaksanaan. Beberapa mahasiswa menilai bahwa terdapat penerima beasiswa yang memiliki hubungan dekat dengan aparat Kesra atau berasal dari keluarga mampu. Selain itu, ditemukan pula penerima yang sudah melampaui batas semester yang ditentukan serta kurangnya keterbukaan informasi mengenai besaran dana yang diterima oleh masing-masing penerima. Hal ini memperlihatkan adanya kelemahan dalam aspek transparansi, keadilan, dan akuntabilitas program. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa standar dan sasaran kebijakan program beasiswa di Kabupaten Kolaka secara konseptual telah dirumuskan dengan baik, yaitu ditujukan bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu. Namun, implementasinya belum berjalan optimal karena masih terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan dalam regulasi dengan praktik di lapangan. Permasalahan utama terletak pada belum selesainya regulasi formal, ketidaktepatan sasaran penerima, lemahnya transparansi informasi, serta pelanggaran terhadap kriteria teknis yang berlaku. Hal ini menegaskan perlunya penguatan dalam aspek pengawasan, transparansi publik, serta penyelarasan antara kebijakan normatif dan pelaksanaan faktual agar tujuan utama program beasiswa yaitu pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat tercapai secara efektif dan berkeadilan.

2. Sumber Daya

Dari segi sumber daya, Penelitian ini akan mengidentifikasi jenis dan jumlah sumber daya yang tersedia, termasuk anggaran, tenaga pelaksana, dan fasilitas pendukung lainnya. Pelaksanaan program beasiswa di Kabupaten Kolaka didukung oleh tiga jenis sumber daya utama, yaitu anggaran, tenaga pelaksana, dan fasilitas pendukung. Dari aspek anggaran, dana program beasiswa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kolaka melalui bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dengan alokasi sekitar Rp1.180.000.000 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 anggran sekitar Rp619.400.000. Dana tersebut diperuntukkan bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi, namun pihak Kesra mengakui bahwa jumlah tersebut belum memadai karena jumlah pendaftar terus meningkat setiap tahun..

Berikut Tabel 1.1 Anggaran Bantuan biaya Pendidikan tahun 2023-2024 di Kabupaten Kolaka.

Tabel 1.1 Anggaran Bantuan biaya Pendidikan tahun 2023-2024

Jenjang	Tahun	Besar Anggaran	Perolehan	Jumlah Pendaftar	Jumlah Penerima
S1	2023	1.180.000.000	Kurang mampu dan Berprestasi: 5.000.000	253 orang	234 orang
			Kedokteran: 5.000.000	5 orang	2 orang

S1	2024	619.400.000	Kurang mampu dan Berprestasi: 4.000.000	198 orang	133 orang
			Kedokteran: 6.000.000	15 orang	5 orang
S2	2024	325.000.000	Kurang mampu dan Berprestasi: 12.500.000	26 orang	26 orang
S3	2024	350.000.000	Kurang mampu dan Berprestasi: 25.000.000	8 orang	8 orang
			Kedokteran: 25.000.000	6 orang	6 orang

(Sumber: Kantor Kesejahteraan Rakyat (KESRA) Kabupaten Kolaka)

Dari aspek tenaga pelaksana, pengelolaan beasiswa dilakukan oleh tim seleksi yang dibentuk melalui keputusan Bupati dan diketuai oleh Sekretaris Daerah, dengan anggota dari Bagian Kesra, Dinas Pendidikan, dan perwakilan perguruan tinggi. Meskipun struktur kelembagaan sudah terbentuk, tim pelaksana masih menghadapi keterbatasan jumlah personel serta belum didukung oleh teknologi informasi yang memadai, sehingga proses administrasi dan verifikasi data berjalan lambat. Dari sisi fasilitas, bantuan beasiswa yang diberikan masih terbatas pada pemberian dana pendidikan tanpa adanya dukungan tambahan seperti bimbingan akademik, pelatihan soft skill, atau sistem informasi beasiswa berbasis digital. Mahasiswa penerima menilai bahwa akses informasi masih kurang terbuka karena tidak adanya saluran komunikasi resmi seperti grup diskusi atau platform daring untuk menyampaikan pengumuman dan informasi pencairan dana. Selain itu, beberapa mahasiswa juga mengungkapkan belum adanya kejelasan terkait jumlah dana yang diterima per orang dan sumber anggaran keseluruhan. Bahkan, muncul dugaan praktik nepotisme dalam proses seleksi penerima, di mana keluarga dekat pengelola lebih diprioritaskan dibanding mahasiswa lain yang memenuhi syarat. Kondisi ini menunjukkan lemahnya transparansi, akuntabilitas, dan pemerataan dalam pengelolaan sumber daya program beasiswa.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program beasiswa di Kabupaten Kolaka masih menghadapi berbagai kendala pada aspek sumber daya. Keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga pelaksana yang profesional, serta minimnya pemanfaatan teknologi informasi menyebabkan pengelolaan program belum berjalan optimal. Selain itu, rendahnya transparansi dan munculnya dugaan praktik ketidakadilan dalam seleksi penerima semakin menurunkan kepercayaan mahasiswa terhadap pihak pengelola. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan alokasi anggaran, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta penerapan sistem informasi beasiswa berbasis digital untuk memperluas akses informasi dan meningkatkan akuntabilitas publik. Dengan demikian, program beasiswa dapat terlaksana lebih efektif, adil, dan benar-benar memberikan manfaat bagi mahasiswa berprestasi yang membutuhkan.

3. Hubungan antarorganisasi

Hubungan antarorganisasi menunjukkan bahwa koordinasi antara KESRA dengan instansi terkait seperti Dinas Pendidikan, perguruan tinggi, dan pemerintah kecamatan masih kurang intensif. Mekanisme koordinasi lebih banyak bersifat administratif dibanding kolaboratif. Akibatnya, informasi mengenai jadwal seleksi dan hasil penetapan penerima tidak selalu tersampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Kurangnya komunikasi lintas lembaga ini turut memperlambat proses implementasi kebijakan (Sahara & Pramono, 2023) yang menegaskan bahwa komunikasi yang tidak efektif antarorganisasi dapat menyebabkan distorsi kebijakan dan menghambat pencapaian tujuan program. Hubungan antarorganisasi dalam pelaksanaan program beasiswa di Kabupaten Kolaka belum berjalan secara optimal. Meskipun struktur koordinasi sudah terbentuk dengan melibatkan berbagai instansi, namun masih ditemukan kelemahan dalam komunikasi, transparansi, dan konsistensi pelaksanaan kebijakan. Perbedaan informasi antara pihak pelaksana dan penerima menunjukkan adanya celah dalam mekanisme koordinasi serta lemahnya pengawasan lintas lembaga. Kondisi ini berdampak pada munculnya persepsi negatif

dari mahasiswa terhadap integritas pengelolaan beasiswa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi lintas instansi melalui sistem komunikasi yang lebih terbuka dan terintegrasi, penerapan mekanisme pengawasan bersama, serta penegakan aturan sesuai peraturan daerah agar program beasiswa dapat terlaksana secara transparan, adil, dan tepat sasaran.

4. Karakteristik Pelaksana

Dari aspek karakteristik pelaksana, struktur birokrasi KESRA sudah jelas dan memiliki pembagian tugas yang terarah. Namun, pelaksana di lapangan masih menghadapi beban kerja yang tinggi dengan sumber daya terbatas. Meskipun demikian, komitmen dan loyalitas pelaksana tergolong tinggi karena mereka memahami pentingnya kebijakan ini bagi masyarakat. Sikap positif tersebut menjadi modal sosial penting dalam mendukung keberlanjutan program. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik birokrasi pelaksana program beasiswa di Kabupaten Kolaka belum berjalan secara efektif. Struktur organisasi memang telah terbentuk dengan jalur koordinasi yang formal, namun belum didukung oleh pembagian tugas yang jelas, SOP yang baku, dan mekanisme pengawasan yang kuat. Perbedaan pandangan antara pihak pelaksana dan mahasiswa menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Lemahnya koordinasi, tumpang tindih peran, serta keterlambatan penyaluran menjadi bukti bahwa kinerja birokrasi pelaksana masih perlu diperbaiki. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan SOP yang jelas, penguatan koordinasi antar bagian, dan peningkatan kapasitas pengawasan agar birokrasi pelaksana dapat bekerja lebih profesional, transparan, dan efektif dalam menjalankan kebijakan program beasiswa.

5. Kondisi Sosial, Politik, Dan Ekonomi

Pada aspek Kondisi Sosial, Politik, dan Ekonomi, hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap program beasiswa sangat tinggi karena dianggap membantu meringankan beban biaya pendidikan. Namun, terdapat persepsi negatif yang muncul akibat kurangnya keterbukaan informasi publik mengenai kriteria seleksi dan nama penerima beasiswa. Situasi ini menimbulkan dugaan adanya ketidakadilan dan praktik nepotisme dalam proses seleksi. Dari sisi politik, komitmen pemerintah daerah terhadap kebijakan pendidikan cukup kuat, tetapi masih perlu diperkuat dengan mekanisme pengawasan independen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas publik.

6. Disposisi Implementator

Terakhir, pada aspek Disposisi Implementator, penelitian menemukan bahwa pelaksana kebijakan memiliki tingkat komitmen yang tinggi terhadap keberhasilan program. Mereka memahami tujuan utama kebijakan, yaitu membantu masyarakat berprestasi dan kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan tinggi. Namun, keterbatasan sistem administrasi dan belum adanya pelatihan teknis menyebabkan beberapa pelaksana belum mampu mengimplementasikan kebijakan secara efektif. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur menjadi langkah penting untuk mendukung keberhasilan implementasi ke depan. Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program beasiswa dan bantuan pendidikan di Kabupaten Kolaka telah berjalan cukup baik meskipun masih memerlukan perbaikan di berbagai aspek. Keberadaan regulasi yang jelas dan dukungan anggaran menjadi faktor pendorong utama, sementara keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan kurangnya transparansi informasi publik menjadi faktor penghambat yang signifikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan (Utami, 2021) dan (Widiyaningrum & Salsabila, 2024) yang menegaskan bahwa transparansi, koordinasi, serta akuntabilitas pelaksana merupakan elemen kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan di daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kolaka perlu mengembangkan sistem informasi beasiswa berbasis digital, memperkuat mekanisme pengawasan publik, dan meningkatkan kompetensi pelaksana agar kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Implementasi program beasiswa dan bantuan pendidikan di Kabupaten Kolaka telah berjalan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 dan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat berprestasi dan kurang mampu. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan program telah memiliki landasan hukum yang

jelas dan dukungan anggaran yang memadai, namun masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta rendahnya transparansi informasi publik. Faktor pendukung utama keberhasilan program meliputi komitmen pelaksana, dukungan politik dan anggaran, serta antusiasme masyarakat terhadap bantuan pendidikan. Secara keseluruhan, efektivitas program beasiswa di Kabupaten Kolaka dapat ditingkatkan melalui penguatan koordinasi lintas lembaga, penerapan sistem informasi beasiswa berbasis digital, serta peningkatan kapasitas dan integritas pelaksana. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan program beasiswa dan bantuan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai kebijakan afirmatif, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun sumber daya manusia unggul dan memperkuat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kolaka.

REFERENSI

- Firdaus, A. P., & Widiyarta, A. (2024). Implementasi kebijakan beasiswa pemuda tangguh dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan. *Journal Publicuho*, 7(4), 2309–2318.
- Irianto, H., Nurany, F., & Pryhasstya Puteri, A. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BEASISWA PEMUDA. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara*, 08(02), 167–184.
- Marwiyah, S., Devi, N. U. K., & Jailani, M. (2022). Implementasi Program Welijo Peduli Stunting Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kerja Puskesmas Tongas (Studi Pada Desa Sumendi Kecamatan Tongas Kabupaten Probolinggo). *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(3), 10374–10379. <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i3.3410>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., Rohidi, T. R., & Mulyarto. (1992). *Analisis data kualitatif: buku sumber tentang metode metode baru*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Rahayu, D., Yulyana, E., & Rahman, R. (2021). Implementasi Kebijakan Beasiswa Karawang Cerdas dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Pelajar di Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 7(7), 416–424. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5731504>
- Rogahang, A. L., Tulus, F. M. ., Palar, N. R. A., & . (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI DESA MOLOMPAR KECAMATAN TOMBATU TIMUR KABUPATEN MINAHASA TENGGARA. APRILITA. *Jurnal Administrasi Publik*, IX(4), 403–409.
- Sahara, S., & Pramono, T. (2023). IMPLEMENTATION OF THE MAYOR REGULATION OF KEDIRI CITY NUMBER 16 OF 2020 CONCERNING ACTIVITY CONTROL ENTERTAINMENT AND TRADE IN THE FRAMEWORK ACCELERATION OF 2019 CORONA VIRUS DISEASE HANDLING. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 7(16). <https://doi.org/10.35722/pubbis.v7i1.718>
- Sugiyono. (2021). *Transparansi Pengelolaan Beasiswa Anak Nelayan Yayasan Pangkai Meureuno Aneuk Nelayan (Ypman) Di Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar*.
- Syachbrani, W., & Baharuddin, S. M. (2019). Implementasi Audit Operasional dalam Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas pada Kantor Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene. *Bongaya Journal of Research in Management*, 2(2), 44–57.
- Utami, Y. P. (2021). Implementasi Program Pemberian Beasiswa Daerah Untuk Mahasiswa Kabupaten Lamandau. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.37304/jispar.v10i1.2285>
- Widiyaningrum, W. Y., & Salsabila, F. (2024). IMPLEMENTASI PROGRAM BEASISWA TI BUPATI (BESTI) OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Volume*, 10(November), 772–787.